

Jurnal Bahasa dan Budaya Jepang

Volume 06, Issue 01, September 2023

Daftar isi

Makna dan Penggunaan Pola Kalimat ~Zuniwaokanai dan ~Zuniwasumanai dalam Kalimat Bahasa Jepang Ragam Tulisan Berupa Buku (<i>Shoseki</i>)	01-13
Pemanfaatan Buku Ajar Marugoto Berdasarkan Respon Mahasiswa Angkatan 2022 Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Darma Persada	14-20
Representasi Edukasi Bagi Anak Perempuan Ketika Memasuki Masa Pubertas Dalam Manga <i>Kocchi Muite!</i> Miiko Karya Ono Eriko	21-28
<i>Bento</i> sebagai Alat Komunikasi antara Ibu dan Anak dalam Film <i>Bento Harassment</i> Karya Renpei Tsukamoto	29-43
Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan <i>Chikan</i> Terhadap Penumpang Wanita	44-56
Analisis Penggambaran Beladiri Naginata Melalui Narasi Visual dalam Manga <i>Asahi Nagu</i>	57-67
Analisis Penggunaan Kandoushi Odoroki Dalam Channel Youtube カジサック KAJISAC (Kajian Pragmatik)	68-82
Perbandingan Teknik dan Tata Cara Bela Diri Panahan <i>Kyūdō</i> Jepang dan <i>Jemparingan</i> Kesultanan Keraton Ngayogyakarta	83-90
Pelestarian Kerajinan Tangan <i>Arimatsu Narumi Shibori</i> di Prefektur Aichi	91-98
Diplomasi Budaya Populer Jepang di Indonesia Melalui Musik J-Pop	99-108
Pengaruh Ikatan Keluarga Tidak Harmonis Terhadap Fenomena Sosial <i>Enjokosai</i> Di Jepang	109-115
Gaya Bahasa pada Lirik Lagu-lagu <i>Ra*bits</i> dalam <i>Game Ensemble Stars Music</i> Karya Saori Kodama	116-126
Analisis Penggunaan Shujoshi No dan Yo Dalam Anime <i>Sono Kisekae Ningyou Wa Koi wo Suru</i>	127-137
Makna Puisi Dalam Anime <i>Chouyaku Hyakunin Isshu: Uta Koi</i> Episode 1-3 Dari Sudut Pandang Semiotika	138-149
Dampak Restorasi Meiji Terhadap Agama Buddha	150-157
Analisis Tokoh Hanamura Benio Menghadapi <i>Westernisasi</i> dalam Anime <i>Haikara-san ga Tooru Zenpen Benio Hana no 17-sai</i> Karya Waki Yamato	158-168
Analisis Representasi Konsep <i>Ikigai</i> dalam Album Jepang <i>BTS THE BEST</i> oleh BTS (Tinjauan Pendekatan Semiotika Roland Barthes)	169-180
Fenomena <i>Ganguro</i> dan Sisi Positif Remaja Putri Jepang yang Bergaya <i>Ganguro</i> dalam Menanggapi Stereotip	181-195
Dampak Program <i>Better Life Union</i> terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Jepang pada Era Meiji Hingga Awal Era Showa	196-205
Fenomena <i>Matahara</i> pada Kalangan Pekerja Wanita di Jepang (Berdasarkan Data 2015 - 2020)	206-216



Diterbitkan oleh:

Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang

Fakultas Bahasa dan Budaya

Jurnal Bahasa dan Budaya Jepang

Volume 06, Issue 01, September 2023

Jurnal Bahasa dan Budaya Jepang adalah jurnal yang terbit setahun sekali dalam bentuk buku cetak. Jurnal ini diterbitkan untuk semua kontributor dan pengamat yang peduli dengan penelitian yang berkaitan dengan bahasa Jepang, pendidikan bahasa Jepang, budaya, sosial dan sejarah.

Jurnal Bahasa dan Budaya Jepang menyediakan forum untuk mempublikasikan artikel penelitian asli, artikel paper-based dan artikel review dari kontributor, terkait dengan bahasa Jepang, pendidikan bahasa Jepang, budaya, sosial dan sejarah, yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya.

Tim Editor



Editor : Ari Artadi, Ph.D.
Wakil Editor : Hari Setiawan, M.A.
Dewan Penasihat : Ir. Danny Faturachman, M.T.
Dr. Ir. Gatot Dwi Adiatmojo, MMA
C. Dewi Hartati, M.Si.
Reviewer : Dr. Hermansyah Djaya, M.A.
Andi Irma Sarjani, M.A.
Hargo Saptaji, M.A.
Juariah, M.A.

Kantor editor:

Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Universitas Darma Persada
Jl. Taman Malaka Selatan, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, 13450, DKI Jakarta,
Indonesia

E-mail : hari_setiawan@fs.unsada.ac.id

Website : jepang.unsada.ac.id

Jurnal Bahasa dan Budaya Jepang

Volume 06, Issue 01, September 2023

Daftar isi

Makna dan Penggunaan Pola Kalimat ~Zuniwaokanai dan ~Zuniwasumanai dalam Kalimat Bahasa Jepang Ragam Tulisan Berupa Buku (<i>Shoseki</i>) Muhammad Dhafa, Andi Irma Sarjani, Riri Hendriati	01-13
Pemanfaatan Buku Ajar Marugoto Berdasarkan Respon Mahasiswa Angkatan 2022 Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Darma Persada Annisa Tasya Alfiani, Herlina Sunarti, Bertha Nursari	14-20
Representasi Edukasi Bagi Anak Perempuan Ketika Memasuki Masa Pubertas Dalam Manga Kocchi Muite! Miiko Karya Ono Eriko Tamara Adzara Hendra, Tia Martia, Zainur Fitri, Metty Suwandany	21-28
<i>Bento</i> sebagai Alat Komunikasi antara Ibu dan Anak dalam Film <i>Bento Harassment</i> Karya Renpei Tsukamoto Dahlia Erviana, Tia Martia, Zainur Fitri	29-43
Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan <i>Chikan</i> Terhadap Penumpang Wanita Eva Putri Sari, Indun Roosiani, Tia Martia	44-56
Analisis Penggambaran Beladiri Naginata Melalui Narasi Visual dalam Manga Asahi Nagu Ryan Firmansyah, Indun Roosiani, Rima Novita Sari	57-67
Analisis Penggunaan Kandoushi Odoroki Dalam Channel Youtube カジサック KAJISAC (Kajian Pragmatik) Kayla Putri Maharani, Ari Artadi, Hari Setiawan	68-82
Perbandingan Teknik dan Tata Cara Bela Diri Panahan <i>Kyūdō</i> Jepang dan <i>Jemparingan</i> Kesultanan Keraton Ngayogyakarta Zistia Iswandari, Herlina Sunarti, Hermansyah Djaya	83-90
Pelestarian Kerajinan Tangan <i>Arimatsu Narumi Shibori</i> di Prefektur Aichi Auliya Putri Indraswari Widyaningrum, Hermansyah Djaya, Hargo Saptaji	91-98
Diplomasi Budaya Populer Jepang di Indonesia Melalui Musik J-Pop Alifa Zanuba, Riri Hendriati, Hari Setiawan	99-108

Pengaruh Ikatan Keluarga Tidak Harmonis Terhadap Fenomena Sosial <i>Enjokosai</i> Di Jepang Alma Nuriedha, Ari Artadi, Yessy Harun	109-115
Gaya Bahasa pada Lirik Lagu-lagu <i>Ra*bits</i> dalam <i>Game Ensemble Stars Music</i> Karya Saori Kodama Anjasmara Arry Pratama, Robihim, Hermansyah Djaya	116-126
Analisis Penggunaan Shuuji No dan Yo Dalam Anime <i>Sono Kisekae Ningyuu Wa Koi wo Suru</i> Fahmi Sutan Syarief Budiman, Ari Artadi, Hargo Saptaji	127-137
Makna Puisi Dalam Anime <i>Chouyaku Hyakunin Isshu: Uta Koi</i> Episode 1-3 Dari Sudut Pandang Semiotika Franstito Arya Sultanto, Robihim, Herlina Sunarti	138-149
Dampak Restorasi Meiji Terhadap Agama Buddha Nanda Annisa Rizky, Ari Artadi, Robihim	150-157
Analisis Tokoh Hanamura Benio Menghadapi <i>Westernisasi</i> dalam Anime <i>Haikara-san ga Tooru Zenpen Benio Hana no 17-sai</i> Karya Waki Yamato Nita Taqiyah Hafizhah, Juariah, Kun M. Permatasari	158-168
Analisis Representasi Konsep Ikigai dalam Album Jepang <i>BTS THE BEST</i> oleh BTS (Tinjauan Pendekatan Semiotika Roland Barthes) Rindi Faidah, Ari Artadi, Hargo Saptaji	169-180
Fenomena <i>Ganguro</i> dan Sisi Positif Remaja Putri Jepang yang Bergaya <i>Ganguro</i> dalam Menanggapi Stereotip Marsha Agustine Latumahina, Hermansyah Djaya, Zainur Fitri	181-195
Dampak Program <i>Better Life Union</i> terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Jepang pada Era Meiji Hingga Awal Era Showa Viona Amandhea Putri, Hermansyah Djaya, Hargo Saptaji	196-205
Fenomena <i>Matahara</i> pada Kalangan Pekerja Wanita di Jepang (Berdasarkan Data 2015 - 2020) Hanri Wicaksono Ibrahim, Hermansyah Djaya, Hargo Saptaji	206-216

Dampak Restorasi Meiji Terhadap Agama Buddha

Nanda Annisa Rizky¹
Ari Artadi²
Robihim³

¹Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Budaya Jepang Universitas Darma Persada

²Dosen Tetap Bahasa dan Budaya Jepang Universitas Darma Persada

³Dosen Tetap Bahasa dan Budaya Jepang Universitas Darma Persada

Fakultas Bahasa dan Budaya, Universitas Darma Persada, Jl. Taman Malaka Selatan, Pondok Kelapa,
Jakarta Timur 13450

E-mail: ari_artadi@fs.unsada.ac.id (corresponding author)

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang dampak restorasi Meiji terhadap agama Buddha berdasarkan kebijakan-kebijakan pemerintah Meiji yang sangat berdampak terhadap agama Buddha dan pengikut ajaran agama Buddha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa kebijakan pemerintah Meiji dan bagaimana langkah-langkah para biksu dan tokoh Buddha untuk mengangkat kembali ajaran Buddha. Penelitian ini menggunakan teori sejarah, agama dan perubahan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan analisis deskriptif dengan mengumpulkan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah Meiji, yaitu pencabutan larangan agama Kristen dan memisahkan agama Buddha dengan kepercayaan Shinto, sehingga terbentuklah gerakan anti-Buddha. Gerakan ini menyebabkan kerusakan besar-besaran yang terjadi di seluruh Jepang, seperti menghancurkan peralatan ritual, kuil Buddha dan patung-patung Buddha, serta pembakaran sutra, dan peleburan lonceng kuil Buddha menjadi perunggu. Gerakan ini bertujuan untuk menghapus ajaran Shakyamuni atau ajaran Shiddharta Gautama atau yang lebih dikenal sebagai ajaran agama Buddha. Para biksu dan tokoh agama Buddha sangat menyadari dengan kejadian-kejadian tersebut sehingga melakukan modernisasi agama Buddha, sehingga agama Buddha dapat diterima kembali oleh masyarakat Jepang dengan mengikuti misionaris Kristen, seperti mendirikan sekolah yang lebih modern, melakukan kampanye anti alkohol, dan ikut serta dalam perang.

Kata kunci: Agama Buddha; Sejarah; Perubahan Sosial; Restorasi Meiji

I. PENDAHULUAN

Jepang merupakan negara yang unik dalam beragama. Dalam sejarahnya, Jepang dipengaruhi oleh 2 agama besar, yaitu agama Buddha dan kepercayaan Shinto, sehingga terdapat penyatuan 2 konsep agama besar di dalam kehidupan bermasyarakat Jepang, seperti pergi ke jinja pada saat tahun baru dan melakukan perayaan obon (perayaan agama Buddha), mereka pergi ke otera. Selain itu, di rumah masyarakat Jepang, terdapat tempat pemujaan agama Buddha (butsudan) dan kepercayaan Shinto (kamidana).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Jepang merupakan salah satu negara yang membebaskan masyarakat untuk memilih agama tanpa adanya paksaan dari pihak lain dan tanpa harus terikat pada salah satu kepercayaan, sehingga masyarakat Jepang bebas melakukan berbagai ritual keagamaan tanpa ada yang mempermasalahkannya.

Kebebasan dan toleransi beragama di Jepang memiliki sejarah yang sangat panjang dan kelam. Jepang dahulu dikenal sebagai negara yang sangat tidak bertoleransi dan menolak ajaran

agama baru yang menurut mereka sangat asing dan berbeda dengan kepercayaan yang mereka anut, seperti dalam sejarah agama Buddha dan agama Kristen di Jepang. Awal penyebaran agama Buddha di Jepang, masyarakat Jepang sudah mengenal kepercayaan Shinto, sehingga menurut Mulyadi (2017) dalam jurnal yang berjudul Konsep Agama Dalam Kehidupan Masyarakat Jepang, mengatakan bahwa terdapat persaingan antara pemuka agama Buddha dengan pemuka kepercayaan Shinto. Selain pemuka 2 agama, persaingan tersebut juga dilakukan oleh 2 klan besar, yaitu klan Soga dan klan Mononobe. Menurut klan Mononobe, kami atau Dewa Shinto akan murka dan kaisar Jepang saat itu tidak setuju terhadap penyebaran agama Buddha, karena kedudukan kaisar ialah berasal dari keturunan Dewa Amaterasu. Pada tahun 585, kelompok pro-Buddhisme yang dipimpin oleh klan Soga dengan kelompok anti-Buddhisme yang dipimpin oleh klan Mononobe mengalami pertempuran, dan klan Soga memenangkan pertempuran tersebut.

Setelah memenangkan pertempuran tersebut, maka Soga no Umako menurut Kenji Matsuo (2007) dalam buku yang berjudul A History of Japanese Buddhism mengatakan bahwa menurut Nihon Shoki 日本書紀, Soga no Umako mempersembahkan agama Buddha dari Bakje (Korea) pada tahun 584 dan membangun kuil untuk diabadikan, yaitu kuil Hokoji, Asukamura, dan Takechi-gun. Setelah itu, ia mengutus seseorang dari kerajaan Koguryo (Korea) yang telah meninggalkan kependetaan Buddha dan melatih 3 wanita menjadi biksu.

Setelah agama Buddha masuk dalam kepercayaan Shinto, maka adanya penggabungan kedua agama, yaitu Buddha dan Shinto. Menurut Susy Ong (2017) dalam buku Seikatsu Kaizen : Reformasi Pola Hidup Jepang disimpulkan bahwa dengan seiring berkembangnya waktu, kepercayaan dewa-dewi Buddha menyatu dengan kepercayaan kepada dewa-dewi lokal, yang disebut kepercayaan Shinto dan menyatu dengan ajaran dan ritual Buddha. Tidak hanya itu, sejumlah kuil Shinto juga menggunakan nama-nama Buddha dan terdapat sejumlah perlengkapan ibadah agama Buddha. Selain itu, beberapa Kaisar mengundurkan diri dan hidup di kuil Buddha sebagai biksu. Penyatuan kedua agama tersebut berlangsung hingga zaman Edo.

Zaman Edo, masyarakat Jepang sangat gerah dengan kepemimpinan keshogunan Tokugawa yang semena-mena dan otoriter, selain itu, orang-orang yang memeluk kepercayaan Shinto kesal oleh agama Buddha akibat dari kebijakan-kebijakan keshogunan Tokugawa yang menganak emaskan agama Buddha dan semena-mena dengan kepercayaan Shinto. Agama Buddha dijadikan sebagai agama nasional Jepang dan masyarakat Jepang diharuskan untuk berafiliasi ke salah satu kuil Buddha dan dicatat oleh sistem danka.

Tahun 1868 hingga 1869 terjadi peristiwa berdarah yang melibatkan keshogunan Tokugawa dengan golongan konservatif. Golongan konservatif menginginkan pengembalian kekuasaan ke tangan Kaisar dan kepercayaan Shinto. Peristiwa berdarah dikenal sebagai perang boshin. Pemicu perang boshin akibat dari ketidakpuasan pada rezim keshogunan Tokugawa.

Setelah perang boshin berakhir, kemunduran agama Buddha mulai nampak terlihat. Setelah golongan konservatif memenangkan pertempuran perebutan kekuasaan, pemerintah Meiji yang memimpin Jepang akhirnya membuat berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut berdampak positif bagi perkembangan bangsa Jepang. Pemerintah Meiji juga mendapatkan desakan dari pihak Barat, sehingga membuat kebijakan mengatur beragama dan mencabut larangan agama Kristen, sehingga masyarakat Jepang bebas memeluk agama apa saja tanpa adanya paksaan dan ancaman dari negara, dikarenakan di zaman Edo, masyarakat Jepang tidak dapat memeluk agama sesuai keinginan mereka, penganut agama Kristen mendapatkan tekanan dan diskriminasi oleh keshogunan Tokugawa.

Pemerintah Meiji mengangkat kepercayaan Shinto sebagai agama nasional Jepang dan memisahkan kepercayaan Shinto dengan agama Buddha yang membuat kepercayaan Shinto sebagai kepercayaan murni dan dapat berdiri sendiri tanpa adanya unsur dari agama lain, yaitu agama Buddha. Pemerintah Meiji juga membuat kebijakan yang mendukung atas kebijakan

pemisahan Shinto-Buddha, yaitu menghapus patung Buddha dari kuil Shinto, menghapus sistem danka, menyita tanah kuil Buddha, dan mengembalikan semua istilah Buddha yang bersifat sinkretisme.

Akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah Meiji, hal ini menyebabkan lahir gerakan anti-Buddha yang dilakukan oleh kelompok kerpercayaan Shinto yang bertujuan untuk menghapus ajaran Shakyamuni atau ajaran agama Buddha. Gerakan ini merupakan gerakan penghancuran besar-besaran di Jepang yang menghancurkan hal-hal yang berbau Buddha, seperti penghancuran kuil dan patung Buddha, instrumen keagamaan, pembakaran sutra, dan peleburan lonceng kuil Buddha menjadi perunggu. Akibat dari gerakan ini menyebabkan agama Buddha mengalami diskriminasi agama dan para biksu menjadi orang-orang sekuler.

Berdasarkan rangkaian peristiwa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kelompok mayoritas dan minoritas dalam beragama. Kelompok mayoritas semena-mena dengan kelompok minoritas dan membuat berbagai kebijakan yang sangat merugikan kelompok minoritas. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi. Kelompok mayoritas seharusnya melindungi kelompok minoritas dan sebaliknya, sehingga toleransi beragama dapat ditegakkan untuk menghindari kejadian serupa di masa yang akan datang. Toleransi beragama menurut Abu Bakar (2015) dalam jurnal yang berjudul Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama mengatakan bahwa toleransi merupakan sikap dan perilaku manusia, di mana seseorang dapat menghormati dan menghargai perilaku orang lain.

Dalam penelitian ini, ada sedikit penelitian dengan tema agama Buddha pada restorasi Meiji, seperti penelitian yang dilakukan oleh Monika Schrimpf (2019) tentang modernisasi agama Buddha, Fauzan Abdillah dan M. Mossadeq Bahri (2018) tentang dampak kebijakan restorasi Meiji. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan agar masyarakat sadar akan pentingnya toleransi beragama dan kejadian yang terjadi di Jepang dapat dijadikan sebagai pelajaran bahwa intoleransi beragama dapat memecah belah bangsa, sehingga konflik agama tidak dapat dihindari dan kejadian tersebut dapat dijadikan pelajaran bagi bangsa Indonesia bahwa toleransi beragama harus ditegakkan, sehingga kejadian serupa yang terjadi di Jepang tidak terulang kembali di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif berdasarkan analisis deskriptif dengan mengumpulkan dan mengolah data informasi serta memilah data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dideskripsikan. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengambilan data yaitu menggunakan metode kepustakaan dengan data yang diperoleh dari jurnal, buku, artikel, dan skripsi.

III. HASIL PENELITIAN

3.1. Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Meiji yang berdampak Terhadap Agama Buddha

Sekitar tahun 1868 hingga 1872, pihak diplomasi Jepang bernegosiasi dengan pihak Barat dan menandatangani perjanjian tersebut, dimana perjanjian ini salah satunya ialah kebebasan beragama. Bagi bangsa Barat ini merupakan pertanda bagus untuk penyebaran agama Kristen dan bentuk toleransi beragama, namun perjanjian ini ditentang oleh masyarakat Jepang. Masyarakat Jepang saat itu khawatir dengan adanya pencabutan larangan penyebaran agama Kristen akan berdampak dengan pengaruh Barat yang diluar kendali.

Setelah Jepang menandatangani perjanjian dengan pihak Barat, maka pemerintah Meiji mencabut larangan penyebaran agama Kristen di Jepang dan masyarakat Jepang bebas untuk memeluk agama apapun sesuai dengan kepercayaan masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Adapun setelah mencabut larangan penyebaran agama Kristen, pemerintah Meiji juga menghapus sistem danka dan penyebaran Kristen semakin pesat di Jepang. Masyarakat Jepang juga bebas untuk memilih agama yang mereka inginkan dan tidak takut lagi akan adanya penyiksaan seperti yang terjadi di era Tokugawa. Para kakure kirishitan 隠れキリシタン juga keluar dari persembunyiannya dan banyak misionaris–misionaris dari negeri Barat datang ke Jepang untuk menyebarkan agama Kristen di Jepang. Ini merupakan ancaman terhadap agama Buddha, sehingga agama Buddha mengalami kemunduran. Ancaman agama Buddha bukan hanya dari agama Kristen, namun kepercayaan Shinto juga sangat mempengaruhi kemunduran agama Buddha.

Pemerintah Meiji bukan hanya mencabut larangan penyebaran agama Kristen, namun juga menjadikan kepercayaan Shinto sebagai ‘agama nasional’ Jepang dan menganggap agama Buddha sebagai ‘agama asing.’ Pemerintah Meiji beranggapan bahwa kepercayaan Shinto merupakan agama asli bangsa Jepang yang sudah ada sebelum Buddha dan agama lain masuk ke Jepang, sedangkan agama Buddha dianggap sebagai ‘agama asing’ karena agama Buddha berasal dari India yang diperkenalkan oleh China melalui selat Korea.

Pemerintah Meiji berusaha untuk memisahkan kepercayaan Shinto dengan agama Buddha dan pemerintah Shinto juga mengandalkan Shinto untuk asas politik religius. Pemisahan agama Buddha dengan kepercayaan Shinto disebut sebagai Shinbutsu Bunri. Pemerintah Meiji melakukan kebijakan ini agar Shinto dapat berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan dari agama Buddha. Kebijakan pemisahan agama Buddha dengan kepercayaan Shinto menjadi pukulan bagi penganut agama Buddha dan berdampak besar pada perkembangannya.

Kaum penganut kepercayaan Shinto merasa senang dengan kebijakan tersebut, dikarenakan saat era Edo, kaum Shinto tidak suka dengan agama Buddha, mereka beranggapan bahwa agama Buddha sangat menonjol dibanding Shinto dan mereka juga mengkritik tentang penggabungan antara agama Buddha dengan kepercayaan Shinto yang berlangsung selama berabad – abad dan menyimpan patung dan menggabungkan struktur arsitektur kuil antara agama Buddha dengan kepercayaan Shinto. Selain itu, saat rezim Tokugawa berlangsung, kuil–kuil Shinto diurus oleh kuil–kuil Buddha, walaupun hidup rukun antar agama, namun Shinto dianggap lebih rendah sehingga banyak kaum elit Shinto tidak terima (Marra, 2014).

Kebijakan pemisahan agama Buddha dengan Shinto yang dibuat oleh pemerintah Meiji diproklamasikan di Daijokan pada tanggal 27 Maret 1868. Kebijakan ini menyebabkan munculnya gerakan radikal yang berusaha untuk menghapus agama Buddha, yaitu Haibutsu Kishaku. Mereka menolak ajaran – ajaran agama Buddha dan lebih mementingkan kepercayaan Shinto. Kebijakan ini menetapkan : Pencabutan biksu Buddha yang melayani di kuil–kuil Shinto, dengan pilihan antara menjadi orang awam atau menjadi pemuka kepercayaan Shinto, penghapusan patung–patung Buddha dari kuil–kuil Shinto dan menggantikan nama–nama Dewa yang sebelumnya nama–nama Buddha menjadi Shinto, pengembalian semua istilah Buddha yang bersifat sinkretisme, penghapusan sistem danka, pemakaman dengan menggunakan tradisi Shinto, penghapusan kelas dan gelar tertentu dalam agama Buddha, menutup kuil–kuil Buddha yang sudah tidak digunakan, penyitaan tanah kuil Buddha, seperti sawah dan ladang perkebunan, pemerintah Meiji mengizinkan para biksu dan biksuni untuk menumbuhkan rambut, makan daging, menjadi masyarakat biasa, dan menikah (kebijakan ini menandai penurunan derajat agama Buddha oleh Jepang).

Kebijakan penghapusan hak istimewa biksu, melegalkan makan daging dan menikah, mengizinkan menggunakan pakaian biasa dan melarang menerima sedekah merupakan salah satu langkah untuk menurunkan derajat dan menghancurkan agama Buddha. Karena banyaknya tekanan dari masyarakat dan para pendukung pembelajaran nasional dan Shinto. Banyak biksu Buddha mendapatkan tekanan yang luar biasa dari orang – orang yang

mendukung Shinto dan para biksu Buddha dipaksa meninggalkan kuil dan menjadi orang – orang sekuler.

Tahun 1871, pemerintah Meiji membuat peraturan menyita tanah milik kuil Buddha yang diberikan oleh keshogunan Tokugawa kepada agama Buddha, sehingga pihak Buddha kehilangan banyak aset, seperti sawah dan ladang perkebunan. Selanjutnya, pemerintahan Meiji juga mencabut status resmi terhadap para biksu dan menjadi biksu swasta atau biksu pribadi yang mencari mata pencahariannya melalui sumbangan dari keanggotaan danka.

Akibat dari kebijakan ini, gerakan anti-Buddha mengalami lonjakan yang sangat tajam. Gerakan anti-Buddha terjadi disekeliling daerah di Jepang, seperti Okayama, Mito, Aizuma, Satsuma, Osumi, Hyuga, dan Choshu, sehingga adanya gerakan penghapusan agama Buddha dan menghancurkan ajaran Shakyamuni atau yang dikenal sebagai Shiddharta Gautama, gerakan ini disebut sebagai Haibutsu Kishaku. (Marra, 2014)

Gerakan anti-Buddha lahir karena adanya kebijakan-kebijakan nasionalisasi Shinto oleh pemerintah Meiji dan melakukan kerusuhan dan pengrusakan besar-besaran di seluruh Jepang . Orang-orang yang mempromosikan gerakan anti-Buddha menghancurkan kuil secara besar-besaran, gambar-gambar Buddha, patung Buddha, lonceng kuil dilebur menjadi perunggu, dan sutra (kitab). Gerakan anti-Buddha menyebar diseluruh penjuru Jepang dan menyebabkan kerusakan pada semua kuil Buddha pada saat itu, sekitar 40.000 kuil Buddha yang dihancurkan dan di Nagasaki sekitar 23 kuil Buddha dihancurkan atau diganti menjadi kuil Shinto, 1060 kuil Buddha dihancurkan di wilayah Satsuma yang sekarang bernama prefektur Kagoshima. Gambar-gambar Buddha dan instrumen Buddha lainnya disimpan di istana, namun saat restorasi Meiji, gambar-gambar dan instrumen Buddha dipindahkan ke tempat lain. Pagoda Kofukuji lima lantai di Nara yang sekarang menjadi harta nasional dijual dengan harga 25 yen atau seperempat dolar. Selain itu, ritual pemakaman yang dulunya menggunakan tradisi Buddha berubah menjadi Shinto. Praktik layanan Buddha yang sudah berjalan selama 10 abad semuanya dihapus. Jinja yang menggunakan nama-nama Buddha dipaksa untuk diganti namanya, perlengkapan peribadatan agama Buddha dan perhiasan yang ada didalamnya juga disingkirkan agar kepercayaan Shinto dapat berjalan sendiri tanpa adanya campuran dari agama lain.

Gambar 3
Perusakan Patung Agama Buddha



(Sumber : <https://www.berfrois.com>)

Gambar 4
Pembakaran Sutra



(Sumber : www.jref.com)

Gambar 5
Peleburan Lonceng Kuil Buddha



(Sumber : Tanaka Nagane, 1907)

Agama Buddha juga mendapatkan diskriminasi dan stigma negatif dari kebijakan pemerintah Meiji yang menginginkan kepercayaan Shinto menjadi kepercayaan atau agama ‘nasional Jepang’, serta pemerintah Meiji juga ingin memperkuat posisi kepercayaan Shinto dimata masyarakat Jepang. Selain itu, pemerintah Meiji juga lebih memfokuskan pada perkembangan kemajuan modernisasi dan memperkenalkan sistem Pendidikan baru untuk mempromosikan kepercayaan Shinto pada masyarakat Jepang dan membatasi perkembangan pendidikan bagi agama Buddha, sehingga agama Buddha kurang berkembang. Banyak pemeluk agama Buddha yang merasa terasing dan tertekan akibat dari kebijakan–kebijakan pemerintah Meiji tersebut.

Sekitar tahun 1871, komisariss kepercayaan Shinto diturunkan pangkatnya menjadi Kementerian kepercayaan Shinto dibawah kabiner dan pada tahun 1872 berubah menjadi kementerian pembangunan. Kementerian pembangunan juga mendirikan pembangunan yang berpusat di Tokyo dan pusat–pusat lainnya yang lebih kecil menyebar di seluruh Jepang.

Minoru Kiyota (2013) dalam artikel berjudul Meiji Buddhism : Religion and Patriotism mengatakan sekitar tahun 1872, pemerintah Meiji mendirikan Institusi Doktrin Agung, institusi ini upaya dari Kementerian Pendidikan yang baru untuk memobilisasi semua institusi Buddha sebagai instrumen–instrumen doktrin negara. Penganut agama Buddha harus tunduk kepada Shinto. Meskipun pada awalnya agama Buddha diserang oleh kebijakan – kebijakan pemerintahan Meiji, namun dengan cepat terintegrasi dalam institut doktrin di seluruh Jepang. Kenji Matsuo (2007) mengatakan bahwa Institut ini membuat 3 prinsip yang harus diajarkan disetiap pengajarannya, yaitu : Mengedepankan prinsip hormat terhadap Dewa dan cinta negara,

menjelaskan hukum alam dan kemanusiaan, menghormati Kaisar sebagai kepala negara tertinggi dan mematuhi perintahnya.

Politik represif yang dilakukan Jepang pada Buddha pada akhirnya memberikan kesempatan kepada Buddha untuk memulihkan diri. Integrasi di dalam Institut Doktrin Agung dan sekularisasi yang dipaksa terhadap biksu menyebabkan kuil Buddha untuk mengorganisir dan mengorientasikan diri kepada masyarakat awam. Kedudukan masyarakat yang rendah memungkinkan agama Buddha bertindak lebih fleksibel. Proses sekularisme para biksu pada akhirnya membawa agama Buddha ke arah yang lebih baru. Selain itu, para biksu juga berkesempatan untuk memulihkan posisi mereka yang hilang.

Tahun 1875, beberapa sekte dari sekte-sekte Shinto mengundurkan diri dari Great Edification Centre dan menuntut kebebasan terhadap keyakinan dan memisahkan antara politik dengan agama, oleh karena itu, pada tahun 1877, Kementerian Pembangunan resmi dihapus. Akibat dari kejadian ini, para komunitas Buddha mulai memulihkan posisi mereka dan agama Buddha setelah adanya insiden yang memilukan akibat dari gerakan anti-Buddha, karena adanya gerakan anti-Buddha inilah yang menyebabkan para biksu dan para pengikutnya mengalami krisis atas ajaran Buddha. (Kenji, 2007)

3.2. Langkah Para Biksu dan Tokoh Buddha Untuk Memodernisasi Agama Buddha

Para tokoh – tokoh agama Buddha melakukan banyak upaya agar agama Buddha tidak semakin menurun dan bisa berkembang ditengah arus ‘diskriminasi’ yang dilakukan oleh pemerintah Meiji maupun masyarakat Jepang. Langkah-langkah yang diambil agar agama Buddha dapat diterima kembali oleh masyarakat Jepang adalah dengan cara memodernisasi agama Buddha dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang dilakukan pada era bakufu. Para penganut agama Buddha juga melakukan introspeksi dan membenahi diri, serta dapat membuktikan kepada pemerintah bahwa agama Buddha bisa menjadi agama nasional. Berbagai langkah yang dilakukan oleh para tokoh agama Buddha dan biksu dengan mengikuti para misionaris agama Kristen, seperti mendirikan sekolah yang lebih modern, melakukan kampanye anti alkohol dan pelacuran, serta mendukung pemerintah Meiji dalam memberantas paham radikalisme. Selain itu, para biksu juga diikutsertakan dalam perang.

IV. SIMPULAN

Pemerintah Meiji membuat kebijakan-kebijakan yang sangat berdampak buruk terhadap agama Buddha, yaitu kebijakan pencabutan larangan penyebaran agama Kristen, pemisahan agama Buddha dengan kepercayaan Shinto, dan menjadikan kepercayaan Shinto sebagai ‘agama nasional’ Jepang. Akibat kebijakan tersebut, maka agama Buddha mendapatkan diskriminasi, para biksu mendapatkan tekanan luar biasa, dan lahirnya gerakan anti-Buddha untuk menghapus ajaran Shakyamuni. Gerakan tersebut melakukan penghancuran besar-besaran di Jepang, yaitu penghancuran kuil, patung, dan alat ritual agama Buddha, serta pembakaran sutra dan peleburan lonceng kuil Buddha menjadi perunggu. Akibat dari gerakan tersebut, para biksu, tokoh dan penganut agama Buddha merasakan dampak yang terjadi akibat kebijakan pemerintah Meiji, sehingga mereka mengambil langkah-langkah agar agama Buddha dapat diterima kembali oleh kalangan masyarakat Jepang dengan cara melakukan modernisasi agama Buddha dengan mengikuti misionaris Kristen, seperti mendirikan sekolah lebih modern, kampanye anti alkohol, serta ikut dalam perang.

V. REFERENSI

- Abdillah, Fauzan & M. Mossadeq Bahri. (2018). Perubahan Buddha Sebagai Agama Menjadi Buddha Sebagai Pemikiran Buddhisme Pada Era Meiji = The Changing of Buddhist to Buddhism In Meiji Period. Makalah. Depok : Universitas Indonesia
- Bakar, Abu. (2015). Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama. Jurnal. Riau : UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- Claudia, Marra. (2014). Haibutsu Kishaku. Pages 173 – 179. Diakses pada tanggal 27 februari 2023, dari <https://nufs.repo.nii.ac.jp/>
- Kiyota, Minoru. (1969). Meiji Buddhism : Religion and Patriotism. Diakses pada tanggal 5 Maret 2023, dari <https://www.asj.upd.edu.ph/>
- Matsuo, Kenji. (2007). A History of Japanese Buddhism. United Kingdom : Global Oriental LTD.
- Mulyadi, Budi (2017). Konsep Agama Dalam Kehidupan Masyarakat Jepang. Diakses pada tanggal 30 Desember 2022, dari <https://ejournal.undip.ac.id/>
- Ong, Susy. (2017). Seikatsu Kaizen : Reformasi Pola Hidup Masyarakat, Panduan Menjadi Masyarakat Unggul dan Modern. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Schrimpf, Monika. (2019). Reformist Buddhist Groups In The Late Meiji and Their Relationship to Christianity. Diakses pada tanggal 20 september 2022, dari https://www.researchgate.net/publication/341034181_Reformist_Buddhist_Groups_in_the_Late_Meiji_Era_and_Their_Relationship_to_Christianity

